

**PENGAWASAN TERHADAP USAHA BIDANG PERIKANAN OLEH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011-2012**

**RianWahyu**

**and**

**Drs. H. Ishak, M.si**

**Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru**

**Email: [Rianwahyu14@gmail.com](mailto:Rianwahyu14@gmail.com)**

***Abstract***

*With the potential of the river through the Kampar of Kampar district, artificial reservoirs and some areas where the land is suitable for development of freshwater aquaculture has become the lifeblood of the district for the development of freshwater aquaculture Riau province have been used as minapolitan by the district directorate of aquaculture . The authors are interested in examining the government control of fishing effort in Kampar district. This study aims to determine the implementation of the monitoring conducted by the Department of Fisheries Kampar and the factors that affect the implementation of the surveillance . Control theory is the rationale in this study . The method used in this research is descriptive metoe analysis with qualitative approach that seeks to analyze the problems that arise in the field and tried to describe as clearly as possible.*

*In the process of monitoring conducted by the Department of Fisheries Kampar district , there are some problems that occur due to oversight that does not work as expected , the problem is where the entrepreneur fish do not get effective coaching and also the lack of funding for entrepreneurs capitalize fish so that the fish businessmen sufficiently constrained to grow their businesses .*

*This research was conducted in Kampar district Particularly in Reservoir Hydroelectric Koto Panjangsubdistrict XIII Koto Kampar , which is the key informants in this study is the Head of Department and Secretary of the Department of Fisheries , Sub Line of Business and Data , Business Sector Sub Fisheries Department of Fisheries , Head XIII Koto Kampar , Tanjung Alai village head , village head Merangin , Entrepreneur fish in hydroelectric reservoirs Koto Panjang , and community leaders .*

*From the results of this study concluded that the lack of effective and weak supervision conducted by the Department of Fisheries Kampar district against businessman fish in reservoirs Hydroelectric Koto Panjangsubdistrict XIII Koto Kampar.*

**Keywords :** *Expectation , Allocation , Performance Monitoring , and Corection Action.*

## Pendahuluan

Provinsi Riau memiliki 3.214 buah pulau besar maupun kecil dengan empat buah sungai besar yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar dan sungai Indragiri Hilir. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 329.867.61 km yang terdiri dari 94.561.61 km daratan dan perairan lautnya 235.306 km dengan perkiraan potensi sumber daya perikanan sebanyak 446.357.6 ton/tahun.

Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi perikanan budidaya air tawar yang sangat besar. Secara geografis, Kabupaten Kampar mempunyai letak geografis yang strategis, yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak disebelah utara, Kabupaten Kuantan Singingi di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat disebelah barat, sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

Dengan potensi yang dimiliki oleh kabupaten Kampar melalui sungai kampar, waduk buatannya dan beberapa daerah yang tanahnya cocok untuk pengembangan budidaya air tawar maka Kabupaten ini menjadi urat nadi bagi pengembangan budidaya air tawar provinsi Riau telah dijadikan sebagai kabupaten minapolitan oleh ditjen perikanan budidaya. Kabupaten Kampar adalah sekian dari Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau yang memiliki 2.112 hektar kolam ikan dan 410 kerambah sungai dan waduk. Sayangnya potensi perikanan khususnya budidaya perikanan di Kabupaten Kampar belum tergarap maksimal. Potensi perikanan budidaya air tawar yang sangat besar.

Kampar memiliki potensi pengembangan budidaya air tawar terutama budidaya kolam, keramba dan jaring apung. Topografi Kampar juga mendukung karena memiliki banyak sungai, waduk, kolam, dan danau . Volume produksi ikan secara keseluruhan di Kampar mencapai kisaran 60 ton per hari, dan 30 ton (50%) di antaranya adalah ikan patin. Seluruh produsen adalah pembudidaya skala kecil, bukan korporasi.

Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan benih dan pakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat dan industri olahan pada tahun 2010-2014.

**Tabel 1.1.**

| Tahun | Jumlah penduduk | Produksi (ton) | Kebutuhan ikan |          | Kebutuhan benih (ekor/th) | Kebutuhan Pakan (ton/th) |
|-------|-----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
|       |                 |                | Konsumsi       | Industri |                           |                          |
| 2010  | 677,52          | 42.256         | 21.784         | 20.472   | 114.091.200               | 63.686                   |
| 2011  | 697,84          | 72.917         | 23.824         | 49.093   | 187.032.105               | 109.376                  |
| 2012  | 718,78          | 117.066        | 25.970         | 91.096   | 284.470.380               | 175.599                  |
| 2013  | 740,34          | 193.303        | 28.220         | 165.083  | 417.534.480               | 289.955                  |
| 2014  | 762,55          | 306.931        | 30.564         | 276.367  | 745.842.330               | 460.397                  |

*Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kampar*

Di PLTA (pembangkit listrik tenaga air) Koto Panjang sendiri menurut dinas perikanan kabupaten Kampar terdapat ribuan unit Keramba Jaring Apung

yang diusahakan pembudidaya. Luas keramba yang diusahakan oleh pembudidaya rata-rata perpetaknya seluas 6x6 m<sup>2</sup>. Luas rata-rata perpetak ini jika dikalikan dengan jumlah unit keramba jaring apung maka total luas lahan KJA yang diusahakan pembudidaya di PLTA tersebut berkisar 245.000 m<sup>2</sup>. Sementara luas waduk di PLTA tersebut mencapai 12.000 ha. Komoditas yang diusahakan oleh pembudidaya sebagian besar adalah ikan mas. Sebagian besar ikan mas yang beredar di seluruh wilayah provinsi Riau berasal dari daerah ini.

Dalam hal ini pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Kampar berperan penting terhadap pembinaan maupun pengawasan tentang usaha perikanan yang ada di kabupaten Kampar tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi dari dinas perikanan kabupaten Kampar berikut ini :

**Tugas Pokok :**

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Perikanan.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

**Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan dan eksplorasi kelautan.
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Perikanan dan eksplorasi kelautan.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan kelautan yang meliputi program produksi dan konservasi prasarana usaha, eksplorasi kelautan serta unit pelaksana teknis dinas.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan pasal 4 ayat 2 menyebutkan setiap usaha perikanan wajib memiliki IUP ( izin usaha perikanan ).sedangkan menurut pasal 3 menyebutkan usaha perikanan terdiri atas :

- a. Izin usaha penangkapan ikan
- b. Izin usaha pembudidayaan ikan
- c. Izin usaha pengumpulan ikan
- d. Izin usaha pengangkutan ikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup, bagian Kedua Rekomendasi Pasal 3 menyebutkan bahwa : badan lingkungan hidup memberikan rekomendasi layak lingkungan kepada instansi teknis di lingkungan pemerintah kabupaten Kampar yang berwenang menerbitkan izin usaha/kegiatan yang mengeksploitasikan sumber daya alam dan memanfaatkan lingkungan hidup yang di perkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan meliputi usaha/kegiatan :

- a. Bidang pertanahan
- b. Bidang pertanian
- c. *Bidang perikanan*
- d. Bidang kehutanan
- e. Bidang kesehatan
- f. Bidang perhubungan
- g. Bidang teknologi satelit
- h. Bidang perindustrian
- i. Bidang pekerjaan umum

- j. Bidang energi dan sumber daya mineral
- k. Bidang pariwisata
- l. Bidang pengembangan nuklir
- m. Bidang pengelolaan limbah
- n. Bidang rekayasa genetika

Sebaiknya pengawasan oleh dinas perikanan kabupaten Kampar mestinya dilaksanakan seefektif mungkin karena dikhawatirkan pendapatan yang seharusnya diterima dari sektor perikanan ini, tidak masuk didalam pendapatan asli daerah (PAD) sehingga akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, dan dalam hal ini tentu mengakibatkan para pengusaha keramba tesebut juga tidak terlalu memperhatikan dampak atau akibat yang mereka timbulkan, dengan begitu, besar kemungkinan akan adanya kerusakan ekosistem di daerah waduk tersebut, hal ini dilihat dari pakan ikan yang terbuat dari bahan-bahan kimia yang dapat merusak ekosistem di waduk dan di sepanjang sungai Kampar

Dengan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **PENGAWASAN TERHADAP USAHA BIDANG PERIKANAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011-2012 ( studi kasus pengawasan terhadap pengusaha ikan di waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar )**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis mengemukakan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap usaha Perikanan di Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Kampar terhadap usaha bidang Perikanan?

### **Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pemerintah belum terlaksana dengan baik di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengawasan pemerintah tersebut di Kabupaten Kampar.

## **Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mendalami kajian yang sama yang berhubungan dengan pengawasan pemerintah tentunya dari sudut pandang dan telaah yang berbeda.
2. Memberikan informasi mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar serta memperlihatkan hambatan yang terjadi agar pengawasan yang akan datang dapat mengantisipasi hambatan tersebut sehingga tidak terjadi lagi.

## **Metode Penelitian**

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang bisa dalam situasi-situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarnya dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pengawasan Terhadap Usaha Bidang Perikanan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012**

Dengan besarnya kawasan perairan di Provinsi Riau saat ini maka pengawasan pemerintah terhadap usaha perikanan harus lebih diutamakan agar perairan yang begitu luas dapat di manfaatkan secara optimal dan tetap lestari dan upaya untuk mendongkrak kegiatan usaha di bidang perikanan. Namun hal ini juga harus mendapat dukungan dari Kabupaten-Kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Di Kabupaten Kampar terdapat potensi sumber daya alam yang sangat menonjol terutama disektor perikanan selain dari sektor perkebunan dan pertanian nya. Dan apabila potensi perikanan tersebut tidak di kelola dengan baik maka akan di khawatirkan potensi perikanan tersebut akan menurun dan juga akan mengakibatkan kerusakan ekosistem biota air, seperti turun nya hasil produksi ikan dan tercemar nya aliran sungai akibat zat zat kimia yang berasal dari pakan ikan dan sampah non organik yang di timbulkan oleh pembudidaya ikan.

berikut adalah daftar tabel jumlah usaha perikanan, jumlah produksi dan luas Perikan di Kabupaten Kampar :

**TABEL III. 4. JUMLAH USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010– 2012**

| No. | URAIAN                 | TAHUN         |               |               |
|-----|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                        | 2010          | 2011          | 2012          |
| 1   | Budidaya kolam         | 6.870         | 6.882         | 6.345         |
| 2   | Budidaya keramba       | 6.120         | 6.321         | 7.024         |
| 3   | Pembenihan             | 98            | 138           | 133           |
| 4   | Penangkapan            | 828           | 831           | 2.887         |
| 5   | Pengolahan pasca panen | 269           | 265           | 265           |
| 6   | Pembuatan pakan ikan   | 97            | 99            | 105           |
| 7   | Pemasaran              | 86            | 86            | 94            |
|     | <b>JUMLAH</b>          | <b>14.369</b> | <b>14.622</b> | <b>16.853</b> |

*Sumber: dinas perikanan kabupaten Kampar*

**TABEL III.5. JUMLAH PRODUKSI DAN LUAS PERIKANAN DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010 – 2012**

| No. | URAIAN                             | TAHUN     |           |           |
|-----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                    | 2010      | 2011      | 2012      |
| 1   | Jumlah Produksi Kolam (Ton)        | 14.135,15 | 18.291,37 | 20.977,00 |
| 2   | Jumlah Produksi Keramba (Ton)      | 9.015,46  | 10.218,99 | 18.295,00 |
| 3   | Luas Areal Budidaya Kolam (Ha)     | 700,03    | 708,08    | 808,02    |
| 4   | Luas Areal Budidaya Keramba (Unit) | 7.150     | 6.793     | 8.414     |

*Sumber: dinas perikanan kabupaten Kampar*

Melihat kondisi tersebut perlu suatu model penanganan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang mampu mensinergikan antara kepentingan pembangunan ekonomi, lingkungan dan kelestarian sumber daya baik untuk kemanfaatan generasi sekarang maupun yang akan datang terutama di era otonomi daerah (desentralisasi) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sektor otonom tersebut tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat sekitar maupun nasional.

Antara perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang erat. Penetapan perencanaan dalam suatu kegiatan sangat penting, karena itu perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendalian dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang akan direncanakan. Dengan demikian jelaslah bahwa tanpa adanya perencanaan maka pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada

pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya. Petugas dari Dinas Perikanan yang melakukan pengawasan terhadap usaha perikanan di Kabupaten Kampar ialah Sub Bagian Perencanaan dan Data, Kepala Bidang Usaha Perikanan, Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap usaha perikanan oleh pemerintah daerah kabupaten Kampar khususnya di waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air Koto Panjang tahun 2011-2012. Dapat dilihat dari beberapa indikator dan sub indikatornya yaitu :

### **1. *Expectation*** (rumusan pelaksanaan tugas)

Suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan kemudian diterapkan ditengah-tengah masyarakat memiliki tujuan didalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. *Expectation* adalah merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas, perikanan yang baik dapat menunjang semua aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Adapun yang menjadi ukuran dan standar dari *expectation*, yaitu memberikan sosialisasi dan pembinaan.

Adanya pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan yang di berikan oleh Dinas Perikanan sebanyak 6 kali dalam setahun pada pengusaha keramba ikan di sekitar waduk PLTA Kabupaten Kampar mengenai cara membudidayakan ikan yang benar dan pemasaran hasil ikan. Kegiatan ini di biyai oleh anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Pemberian sosialisasi dan pembinaan ini bertujuan agar para pembudidaya ikan atau pengusaha ikan dapat mengembangkan usaha mereka menuju yang lebih baik sehingga mereka bisa mandiri dalam melakukan usaha mereka. Para petugas lapangan dari dinas perikanan yang berjumlah 8 orang di bagi 2 orang perkecamatan. Petugas yang telah di bagi sebanyak 2 orang perkecamatan inilah yang turun kelapangan bertugas untuk memberikan sosialisai dan pembinaan

pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan didalam pelaksanaan tugas dalam pengawasan pemerintah terhadap pengusaha ikan sudah dilakukan. Pelaksanaan pengawasan sebagai salah satu sasaran yaitu melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan pengusaha ikan dan masyarakat mengenai pengawasan pemerintah terhadap usaha perikanan di Kabupaten Kampar, khususnya daerah sekitar waduk PLTA Koto Panjang.

### **2. *Allocation***(alokasi)

Pengalokasian sumber daya yang ada dapat diartikan sebagai suatu model penataan lingkungan yang dari tidak teratur menjadi teratur. Disamping itu dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas umum yang dibutuhkan, sedangkan pada prinsipnya mendapatkan hasil yang dapat dirasakan secara berkesinambungan oleh khalayak ramai. Pengalokasian sumber daya yang ada, secara tepat dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan yang efektif. Hal ini didalam indikator *allocation* (alokasi) ada beberapa hal yang dapat dilihat sebagai berikut :

#### **a) Dana dan anggaran**

Dana dan anggaran adalah salah satu instrumen yang penting didalam melakukan setiap kegiatan yang bersifat mendukung terhadap segala usaha yang

diupayakan dari sebuah kebijakan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan pengawasan anggaran berperan sangat penting dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat maksimal dan sesuai yang diinginkan. Dana dan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perikanan dalam tahun 2012 berjumlah 129.349.634. dana tersebut di anggarkan untuk membiayai pengawasan yang dilakukan oleh para petugas dari dinas perikanan. Diharapkan dengan dana yang ada akan mampu mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan terhadap usaha perikanan oleh dinas perikanan kabupaten kampar.

keterbatasan anggaran yang tersedia untuk dialokasikan terhadap bidang perikanan sangat berpengaruh terhadap maksimalnya pelaksanaan pengawasan tersebut untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang di harapkan, maka dalam hal dana dan anggaran dapat di katakan kurang baik di karenakan terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pengawasan terhadap usaha bidang perikanan tersebut. karna dengan dana yang begitu minim sedangkan kawasan perikanan yang begitu luas tentu akan mengakibatkan kan tidak berjalan nya tugas atau program-program dinas Perikanan Kabupaten Kampar secara efektif

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki dalam mengawasi usaha bidang perikanan.

Mengakumulasi jumlah Sumber Daya Manusia pengawas dilapangan sebagai pengalokasian sumber-sumber daya yang ada untuk mengawasi usaha bidang perikanan di Kabupaten Kampar khususnya di sekitar waduk PLTA Koto Panjang. Jumlah petugas pengawas di lapangan berjumlah 8 (delapan) orang. Kedelapan orang pengawas tersebut mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, ada yang tamat SMA dan Sarjana.

jumlah petugas dilapangan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan masih minim. padahal seharusnya pada kawasan Perikanan yang begitu luas perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif untuk membantu para pengusaha ikan di sekitar waduk PLTA kecamatan XIII Koto Kampar. Sehingga untuk hal ini jumlah petugas yang dimiliki kurang baik. Seharusnya petugas pengawas di lapangan tersebut berjumlah 15 orang atau lebih. Dengan begitu para petugas di lapangan bisa berkerja dan melakukan tugas mereka dengan baik. Dan juga dalam merekrut pegawai harusnya Dinas Perikanan lebih selektif, karna pengalaman dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap kerja para pengawas tersebut.

- b. Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengawasan di bidang Perikanan

Menghimpun jumlah fasilitas yang dimiliki untuk dialokasikan dan digunakan didalam melakukan pengawasan pemerintah terhadap usaha Bidang Perikanan.

**Tabel.III.6. Jumlah fasilitas dan prasarana yang dimiliki Dinas Perikanan di Kabupaten Kampar**

| No | Perlengkapan                        | Jumlah (unit) |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1  | mobil operasional (kendaraan dinas) | 1             |
| 2  | motor (kendaraan dinas)             | 3             |
|    | Jumlah                              | 4             |

*Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kampar*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah fasilitas yang dimiliki adalah berupa 3 unit motor operasional, 1 unit mobil operasional. Seharusnya



sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan jumlah fasilitas yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Kampar masih kurang. Yang seharusnya berjumlah 2 unit mobil dan 5 unit motor operasional. Program kegiatan sarana pendukung Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut :

- a. Pengadaan kapal motor di kawasan KJA waduk PLTA Koto Panjang
- b. Pengadaan escapator
- c. Pembangunan tiang tambatan keramba di sungai
- d. Pengadaan kendaraan operasional lapangan

Dilihat dari program kegiatan sarana pendukung dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, seharusnya pengawasan yang dilakukan tidak akan mendapatkan hambatan yang berarti.

fasilitas yang dimiliki masih kurang dan memerlukan penambahan sesuai dengan apa yang diketahui dari hasil wawancara diatas didalam melakukan pengawasan dilapangan. Bahwa dalam hal ini kurangnya fasilitas seperti kendaraan operasional yang dimiliki dalam menunjang pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap usaha bidang perikanan masih kurang dan perlu ditambah dan juga penulis melihat dilapangan bahwa kondisi kapal motor milik dinas perikanan yang ada di waduk PLTA Koto Panjang tersebut sudah lama dalam keadaan rusak, dan apabila para petugas datang untuk melakukan pengawasan, mereka menyewa kapal motor milik pengusaha ikan di waduk tersebut, hal ini tentu berakibat pemborosan anggaran yang sebelumnya tidak ada untuk menyewa kapal motor sehingga dalam hal ini dapat dikatakan kurang baik.

### **3. *Monitoring Performance*** (tindakan penilaian)

Merupakan penilaian apakah suatu pengawasan yang dilaksanakan sebagaimana direncanakan. Monitoring akan memberikan umpan balik yang terus menerus pada kebijakan yang dilaksanakan dan mengidentifikasi masalah begitu muncul dengan mencatat dan memonitoring hasil kegiatan. Berikut kutipan wawancara mengenai langkah monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Sub Bagian Perencanaan dan Data Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

#### **a) Turun kelapangan mengamati keadaan kawasan Perikanan**

Mengamati secara langsung di daerah atau tempat dimana terdapat usaha perikanan salah satunya yaitu di waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan turun kelapangan dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap usaha perikanan tersebut agar tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. dari Dinas Perikanan sendiri telah mengirimkan petugas untuk mengamati keadaan yang terjadi di lapangan. Para petugas yang datang ke lapangan berjumlah 2 orang. Mereka dibagi menjadi 2 orang perkecamatan. Petugas yang melakukan pengawasan dan menilai bagaimana hasil dari pembinaan dan sosialisasi yang mereka lakukan sebelumnya, setelah mereka melakukan pengecekan di lapangan, dan apabila terdapat suatu kesalahan yang di temukan oleh pengawas, maka para pengawas tersebut harus memberikan pengarahan atau pembinaan secara persuasif terhadap para pengusaha atau pembudidaya ikan tersebut. dan setelah itu baru pengawas dilapangan membuat laporan hasil dari kegiatan pengawasan itu.

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Perikanan yang dirasakan sebagian pengusaha ikan belum efektif, hal ini dapat dikatakan kurang baik, hal ini terlihat dalam pelaksanaannya petugas kurang profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Berbeda dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, hal seperti ini harus segera di tindak lanjuti. Agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan para pengusaha ikan di waduk PLTA Koto Panjang tersebut.

#### **4. Corection action** (tindakan perbaikan)

Melakukan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan. Mengambil tindakan perbaikan melalui tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar pelaksanaan tugas tetap mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terkait. Berikut adalah tabel capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada tahun 2011:

**TABEL III.7.CAPAIAN KINERJA DISKAN KAB. KAMPAR BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2011.**

| NO | RINCIAN   | SASARAN    | CAPAIAN  | PERSENTASE CAPAIAN (%) |
|----|---|------------|----------|------------------------|
| 1. | Produksi ikan budidaya (ton)                      | 25.500     | 13.536   | 59,81                  |
| 2. | Produksi ikan tangkapan perairan umum (ton)       | 800        | 409      | 50                     |
| 3. | Produksi benih (ekor)                             | 90.000.000 | 8.937.79 | 20,71                  |
| 4. | Produksi pakan local (ton)                        | 13.500     | 8.557    | 75,42                  |
| 5. | Produksi ikan olahan (ton)                        | 200        | 131      | 65,50                  |
| 6. | Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)                      | 32         | 25       | 70.59                  |
| 7. | Kesempatan kerja (RTP)                            | 15.000     | 10.872   | 70,15                  |
| 8. | Kelompok pengawas berbasis masyarakat (Pokwasmas) | 26         | 12       | 40,31                  |

*Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kampar*

Pada tabel diatas dapat kita lihat sasaran dengan capaian kinerja Dinas Perikanan tidak seimbang, rata-rata persentase capaian kinerja nya hanya 60 -70 persen pada tahun 2011. Oleh karena itu Dinas Perikanan harus lebih meningkatkan capaian kinerja nya dengan melakukan perbaikan dari kinerja Dinas Perikanan itu sendiri.

##### **a) Melakukan perbaikan terhadap usaha perikanan**

Dalam konteks berkelanjutan, pengelolaan sumber daya perikanan harus di laksanakan dalam satu pola yang menjamin dan mendongkrak ekonomi masyarakat, kelestarian lingkungan, menjaga keseimbangan biologis dan memperbaiki kualitas usaha perikanan itu sendiri. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar telah melakukan perbaikan terhadap para pengusa ikan di waduk PLTA Koto Panjang. Para petugas yang turun kelapangan telah memberikan sosialisasi mengenai bagaimana mengembangkan dan meningkatkan produk dan hasil dari pengusaha ikan itu sendiri. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar masih belum efektif melakukan tugas mereka di karenakan masih banyak nya para pengusaha

kramba ikan di waduk PLTA Koto Panjang belum mendapatkan bantuan berupa pakan ikan, materi dan pengetahuan yang memadai tentang usaha perikanan.

## **B. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pengawasan Pemerintah terhadap Usaha Bidang Perikanan di waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.**

Telah di ketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengawasan Pemerintah terhadap Usaha Bidang Perikanan di Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2011-2012. Setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan terhadap usaha bidang perikanan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012. (studi kasus tentang pengawasan terhadap pengusaha ikan di waduk PLTA Koto Panjang).

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat pengawasan pemerintah adalah sebagai berikut :

### **1. Sumber Daya Manusia**

Faktor terpenting dalam melaksanakan koordinasi adalah adanya sumber daya manusia. Untuk kelancaran suatu koordinasi dibutuhkan manusia yang produktif, serta kemampuan manusianya yang handal sebagai pengelola yang profesional dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengawasan. Etika pemerintahan menjadi salah satu tonggak dasar dalam mewujudkan perilaku dan tindakan aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat, yang kemudian menciptakan sumber daya manusia yang bagus. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan agar dalam tugasnya mampu dan dapat di rasakan baik oleh masyarakatnya.

### **2. Kendala regulasi (aturan)**

Di dalam menjalankan tugas dan menata kehidupan masyarakat sudah barang tentu adanya peraturan atau regulasi yang mampu mengatur dan menjadi pedoman, untuk itu hal yang terpenting apakah peraturan tersebut mampu menjawab dan memberikan manfaat yang baik bagi ruang lingkup yang diatur. Sewaktu-waktu perubahan akan terjadi disini peran dari regulasi yang di anggap sangat penting untuk senantiasa menjawab perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yakni Dinas Perikanan Kabupaten Kampar harus mengacu pada peraturan yang telah di tetapkan, kendala saat ini adalah belum terlaksananya

### **3. Kendala Organisatoris**

Dalam menjalankan pengawasan harus di dukung penuh dengan seluruh aspek yang terkait didalamnya, jika salah satunya tidak berjalan sebagaimana mestinya akan berdampak pada seluruh proses pengawasan tersebut. Kerja sama yang baik bisa menjadikan Dinas Perikanan menjadi sebuah Organisasi yang bisa berjalan dengan baik dan lancar, disamping itu juga perlu adanya komunikasi yang baik, tanpa adanya kerjasama dan komunikasi yang baik, sebuah organisasi tidak akan bisa menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam hal pengawasan ini kendala yang dirasakan kurang kerjasama yang dibangun dalam ruang lingkup Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas, jika ini terus berlanjut dan tidak

secepatnya diperbaiki akan berdampak tidak berhasilnya tujuan yang dijalankan oleh suatu organisasi.

#### 4. Kendala Administratif

Administratif menjadi hal terpenting dalam melayani kebutuhan masyarakat kepada pemerintah, administratif berguna sebagai pendukung untuk memudahkan dan membantu mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Kendala yang terjadi dalam proses pengawasan ini adalah dalam hal pelayanan pengawasan terhadap usaha bidang perikanan di waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar Administratif.

Administrasi hal yang menjadi ukuran keberhasilan dari sebuah regulasi, tetapi Dinas Perikanan belum bisa efektif dalam melakukan administrasi karna terhambat keterbatasan pegawai yang profesional, hal tersebutlah yang menghambat terlaksananya pengawasan terhadap usaha perikanan di Kabupaten Kampar. Untuk itu sekiranya aparatur pemerintahan mengevaluasi tugas-tugas yang telah di laksanakan, apakah sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau yang telah terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pelayanan yang secepatnya ada tindakan tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

#### 5. Anggaran

Anggaran merupakan sesuatu yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan, karna pengawasan bisa berjalan dengan baik apabila ada sumber dana untuk melaksanakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

salah satu kelemahan yang bisa dilihat saat ini di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yaitu lemahnya para petugas menyusun anggaran dan memperjuangkan agar anggaran yang diusulkan di setuju oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar, apabila ini terjadi maka visi-misi Dinas Perikanan akan sulit tercapai, untuk mengawasi pengawasan terhadap usaha bidang perikanan di Kabupaten Kampar tidak akan terlaksana selama terkendala anggaran, contohnya saja seperti pakan ikan masih di datangkan dari provinsi lain seperti dari medan, hal ini tentu menyulitkan para pengusaha di bidang perikanan di Kabupaten Kampar.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan Pengawasan Terhadap Usaha Bidang Perikanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012 ( Studi kasus pengawasan terhadap pengusaha ikan di waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar) disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan terhadap usaha bidang perikanan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kampar kecamatan XIII Koto Kampar di lapangan kurang terlaksana dengan baik. Pengawasan Pemerintah yang dilakukan oleh tim Pengawas belum terlaksana dengan baik di Kabupaten Kampar berdasarkan jawaban dari informan yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

2. Keberhasilan pelaksanaan suatu pengawasan juga di pengaruhi oleh adanya partisipasi dari masyarakat yang ikut mendukung program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap Usaha Perikanan tersebut.

Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menghambat pengawasan pemerintah terhadap usaha bidang perikanan ini dapat dilihat dari kendala sebagai berikut :

- a. Sebagian besar kawasan perikanan di kabupaten Kampar belum di manfaatkan dengan baik karena pengawasan belum begitu efektif
- b. Dari Dinas Perikanan Kurangnya personil pengawas yang diturunkan ke lapangan
- c. Kurang maksimalnya biaya atau anggaran untuk biaya pengawasan terhadap usaha bidang perikanan

### **Saran**

Walaupun di Kabupaten Kampar telah di lakukan Pengawasan Pemerintah terhadap usaha perikanan, namun dilihat dari lapangan masih terdapat para pengusaha ikan yang belum di perhatikan oleh pemerintah khususnya di waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar. Diharapkan agar semua instansi terkait baik itu dari Dinas Perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, para pengusaha ikan, dan masyarakat Kabupaten Kampar agar lebih meningkatkan keinginan dalam membangun usaha perikanan yang maju sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar.

Penulis mengharapkan usaha perikanan di Kabupaten Kampar tetap optimal dan terus berkembang sesuai dengan visi dan misi Dinas Perikanan yang bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Kampar sebagai pusat perikanan di Provinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- H. Bohari, 1992, *Pengawasan Negara*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Safri Harahap. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen (management control system)*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.
- Sukanto. 1992. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Efendy Sofian, 1995. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Syafriz Sofyan, 2004, *System Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Quantum
- Mulia Nasution, 2000, *Pengawasan dalam organisasi*, Penerbit: Djambatan, Jakarta .
- Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sandri, Haprizal. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum*. Bening Publisier, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moleong, J. Lexy. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung,.
- Handoko, T, Hani, 1995, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Nitisemito, Alex, 1989, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sondang, Siagian, 1995, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung. Jakarta.
- Winardi, 1979, *Azas-azas Manajemen*, Alumni Bandung, 1979, Bandung.

### Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
2. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
3. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan pasal 4 ayat 2
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup

### Sumber-sumber lainnya

- Riza. 2013. *Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa Mengenai Retribusi Karet Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012*. Pekanbaru: Universitas Riau
- Feriadi. 2012. *Pengawasan Terhadap Proses Pemotogan Hewan Di Tempat Pemotongan Hewan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011*. Pekanbaru: Universitas Riau
- <http://dep.blogspot.com/2011/12/perikanan-air-tawar-indonesia.html> , 10 September 2013
- <http://kajianpustaka.blogspot.com>